

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim, and Kusufi Muhammad Syam. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Abdullah. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir Terjemahan Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.
- Adam, Latif, Mustanir Ahmad, and Irwan. *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan*. Jawa Timur: Qiara Media, 2020.
- Albi, Anggito, and Setiawan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Arfan, Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy, and Oktaviani Ayu. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi Dan Manajemen)*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Arfan, Ikhsan, Muhammad Yamin Noch, Heny Triastuti Kurnia Ningsih, and Hamdani. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. "Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa." Accessed December 1, 2020. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesapdf>.
- Benny, Satria M. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan." Palembang: Universitas Muhammad Palembang, 2019.
- Bi, Rahmani Nur Ahmad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Jawa Barat: Diponegoro, 2013.
- Fransiska, Singkali Olga Yani, and Widuri Retnaningtyas. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara." *Tax & Accounting Review* 4, no. 02 (2014).
- Hendra, Hermain, Anggriyani, Nurlaila Rasidah, Olivia Hastuti, Wahyudi Desy Farina Herry, and Syafina Laylan. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Medan: Medenatera, 2019.
- Idris, Patari M. *Ombudsman Dan Akuntabilitas Public*. Makassar: De La Mocca, 2015.
- Inapty, RR M. Ali Fikri Biana Adha, and Martiningsih Sri Pancawati. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 9, no. 1 (2016).
- Inesa, Trihani. "Analisis Manfaat Basis AkruaL Dan Basis Kas Menuju AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Solok)." *Jurnal Ekonomi* (n.d.).
- Kementrian Keuangan. "Modul Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL." Accessed November 24, 2020. <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akruaL/modul1/MODUL-1-KONSEP-DAN-SIKLUS-AKUNTANSI-PEMDA.pdf>.

- Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. "Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem Dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa." Accessed December 17, 2020. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-des-a-2019-11-05-6e15d0e3/>.
- Khairani, Farida. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* 4, no. 3 (2017).
- Lembaga Independen Pemerhati Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Bahan Bacaan BIMTEK Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Aplikasi Kabupaten Labuhan Batu*, 2019.
- Lestari Sri. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudon)." Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.
- Manggaukang, Raba. *Akuntabilitas (Konsep Dan Implementasi)*. Malang: UMM PRESS, 2020.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Masta, Yusniari Sri. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)." Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014." *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* 72, no. 10 (2014). [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2014+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202014+Lampiran.pdf).
- Mustazir Ramli. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10, no. 1 (2017): 20.
- Nuramalia, Hasanah, and Fauzi Achmad. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media, 2017.
- Putri, Utami Sinta. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah." Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2019.
- Roni, Prandara. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu)." Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Sri, Nurhayati, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susilowati, Lantip. "Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).
- Suyatmiko Candra. "Implementasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)." Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,” n.d.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, n.d.
Q.S. Al-Muddassir (74): 38, n.d.
Q.S. Al-Qiyamah (75):36, n.d.
Q.S. An-Nisa (4): 58, n.d.
Q.S. An-Nisa (4):59, n.d.
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

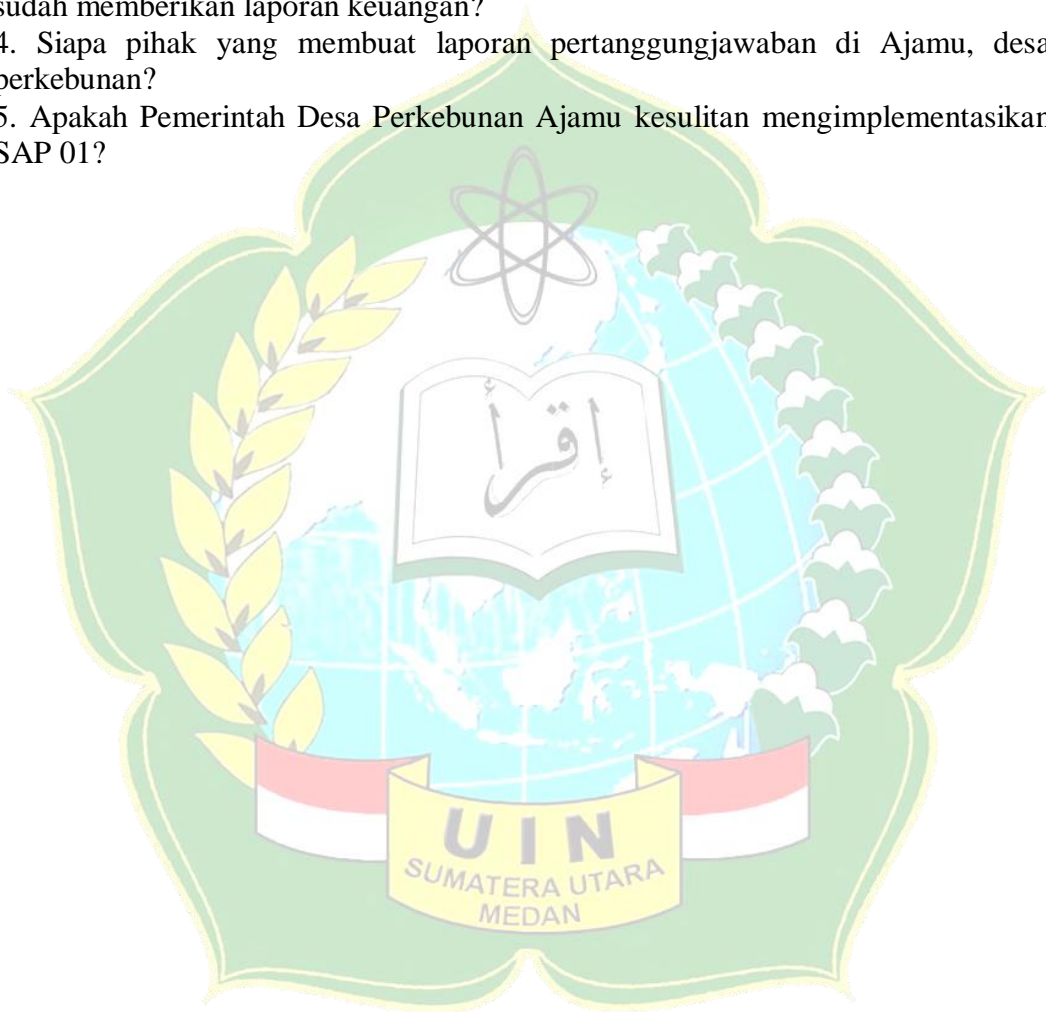


Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tanggapan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi pertanyaan yang diajukan selama wawancara.

1. Dalam hal pembukuan keuangan desa perkebunan Ajamu, apakah pemerintah desa sudah menerapkan PSAP 01?
2. Catatan keuangan seperti apa yang dimiliki pemerintah desa perkebunan Ajamu?
3. Sesuai dengan UUD yang berlaku, apakah pemerintah desa perkebunan Ajamu sudah memberikan laporan keuangan?
4. Siapa pihak yang membuat laporan pertanggungjawaban di Ajamu, desa perkebunan?
5. Apakah Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu kesulitan mengimplementasikan SAP 01?



Lampiran 2

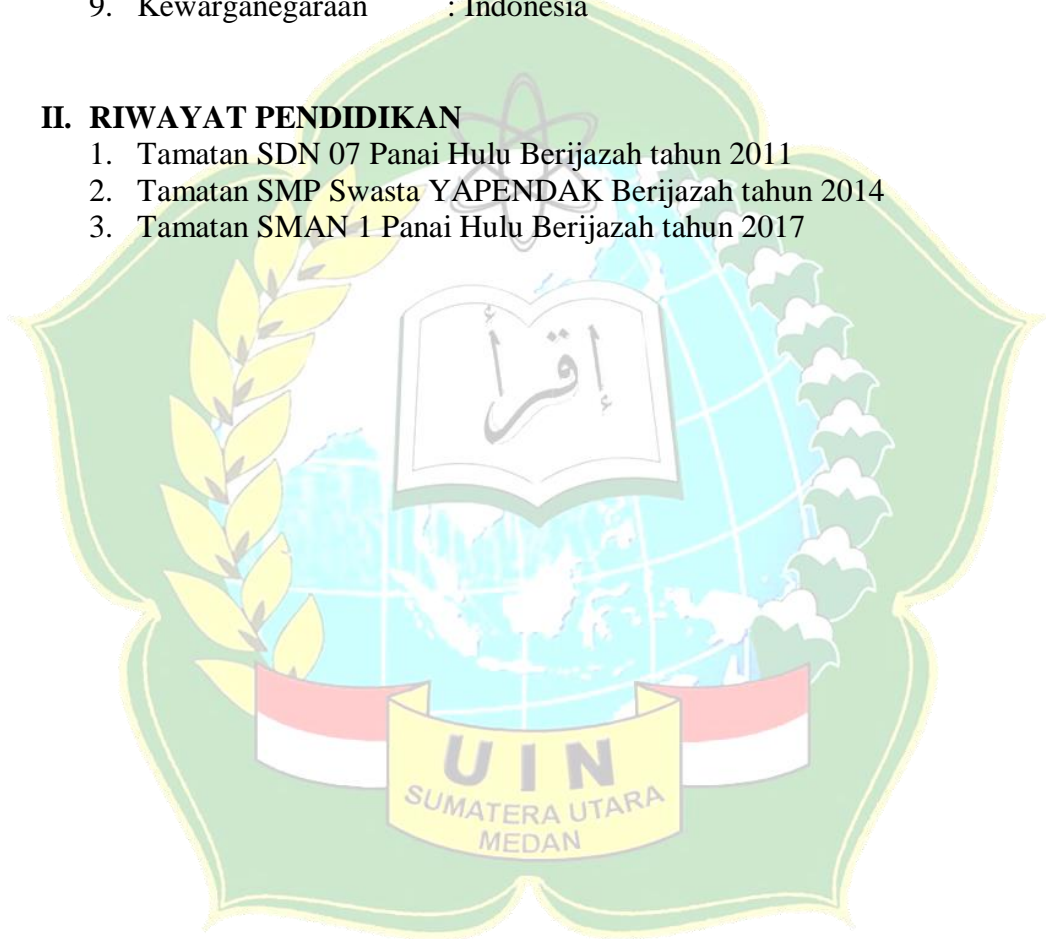
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. INDETITAS PRIBADI

1. Nama : Yunita Patmasari
2. NIM : 0502171063
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ajamu, 06 february 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Perkebunan Ajamu 1, Afdeling 1
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Status : Belum Menikah
9. Kewarganegaraan : Indonesia

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 07 Panai Hulu Berijazah tahun 2011
2. Tamatan SMP Swasta YAPENDA K Berijazah tahun 2014
3. Tamatan SMAN 1 Panai Hulu Berijazah tahun 2017



Lampiran 3

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEEMERINTAH DESA PERK. AJAMU
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

Kode REK	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	2.125.144.000	2.089.166.000	35.978.000
4.2.1	Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	854.818.000	854.818.000	0
4.2.2	Alokasi Dana Desa	1.218.326.000	1.218.326.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.125.144.000	2.089.166.000	35.978.000
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	717.300.000	572.456.715	144.843.285
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.900.000	57.900.000	7.000.000

5.1.	Penghasilan	545.300.000	440.100.000	105.200.000
2.	Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
5.1.	Jaminan Sosial	57.300.000	31.656.715	25.643.285
3.	Kepala Desa dan Perangkat Desa			
5.1.	Tunjangan BPD	49.800.000	42.800.000	7.000.000
4.				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	619.248.045	577.511.000	41.737.045
5.2.	Belanja Barang	135.228.045	120.205.000	15.023.045
1.	Perlengkapan			
5.2.	Belanja Jasa	195.990.000	187.800.000	8.190.000
2.	Honorarium			
5.2.	Belanja	239.100.000	220.600.000	18.500.000
3.	Perjalanan Dinas			
5.2.	Belanja Jasa	9.900.000	9.900.000	0
4.	Sewa			
5.2.	Belanja	18.060.000	18.036.000	24.000
5.	Operasional Perkantoran			
5.2.	Belanja	5.970.000	5.970.000	0
6.	Pemeliharaan			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada	15.000.000	15.000.000	0
7.				
5.3.	Belanja Modal	494.707.500	138.419.500	356.288.000

5.3.	Belanja Modal	330.288.000	0	330.288.330
1.	Pengadaan Tanah			
5.3.	Belanja Modal	127.419.500	127.419.500	0
2.	Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat			
5.3.	Belanja Modal	26.000.000	0	26.000.000
3.	Kendaraan			
5.3.	Belanja Modal	11.000.000	11.000.000	0
9.	Lainnya			
JUMLAH BELANJA		1.831.255.545	1.288.387.215	542.868.330
SURPLUS/ (DEFISIT)		293.888.455	800.778.785	(506.890.330)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	134.411.545	134.411.545	0
6.1.	SILPA Tahun	134.411.545	134.411.545	0
1	Sebelumnya			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	428.300.000	428.300.000	0
6.2.	Penyertaan	428.300.000	428.300.000	0
2	Modal Desa			
PEMBIAYAAN NETTO		(293.888.455)	293.888.455	0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0	506.890.330	(506.890.330)

Sumber: Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu

Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA

